

# KONSEP DAN APLIKASI KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan

## Pendahuluan

Manusia di dunia ini, dapat dipastikan sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memerlukan berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, kesehatan, bahkan sampai hubungan pribadi manusia dengan Sang Pencipta. Dalam dimensi pribadi ini, seorang manusia dianugerahi berbagai talenta dan keahlian yang khusus diperuntukkan Tuhan kepadanya. Dengan demikian sebagai makhluk individu manusia tetap bergantung kepada lingkungan termasuk dalam mengelola dirinya sendiri.

Di sisi lain, manusia juga adalah makhluk sosial, yang memerlukan orang lain dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosialnya. Manusia tidak hanya sebagai makhluk individu yang berdiri sendiri, namun ia juga sebagai makhluk sosial, yang berinteraksi dengan sesamanya, yang diperlukan dalam mengisi kehidupan sosialnya. Manusia sebagai makhluk sosial ini, melakukan berbagai aktivitas kelompok, yang turut juga menjadi identitas pribadinya. Kelompok itu bisa saja dalam bentuk keluarga, klen, kelompok etnik atau suku bangsa, kelompok profesi, kelompok agama, kelompok diskusi lintas agama, kelompok desa, kelompok remaja, dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang di dalam masyarakat tertentu, kelompok ini memiliki sistem sosial yang khas yang mengatur individu-individu anggotanya dalam mengisi kehidupan sosial. Misalnya di Bali kelompok petani membentuk sistem *subak*, yang mengatur kehidupan mereka. Demikian pula masyarakat Batak Toba memiliki kesatuan sosial seperti *sada huta*, *sada marga*, *sada homban*, dan lainnya. Masyarakat Mandailing memiliki sistem sosial kepemimpinan yang disebut *namora-mora natoras-toras*. Demikian juga masyarakat Jawa Deli memiliki kesatuan sosial *pareduluran* yang diikat oleh kesamaan perjuangan nasib yaitu *sederek tunggal kapal*, dan lain-lainnya.

Dalam masyarakat tradisi umumnya berbagai sistem sosial dan budaya, merujuk ke dalam apa yang disebut *adat*. Institusi inilah yang mengatur individu dan harmoni sosial. Setelah datangnya agama-agama di kawasan nusantara maka adat dan agama biasanya diselaraskan dan difusikan, dalam konteks yang disebut pembumian ajaran agama. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia juga memerlukan bimbingan agama dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, bimbingan melalui ajaran-ajaran agama yang dianut ini, akan turut mengarahkan manusia ke jalan yang manusiawi. Dengan demikian adat dan agama membawa seorang manusia ke jalan Tuhan.

Selain itu, dalam mencapai cita-cita bersama, umumnya kelompok manusia membentuk negara bangsa, yang didukung oleh rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan perangkat-perangkat negara lainnya. Timbulnya sebuah bangsa ini biasanya dilatarbelakangi oleh sejarah, kebudayaan, dan cita-cita bersama. Bahkan ada yang dipicu oleh faktor karena dijajah oleh penjajah yang sama. Tidak jarang pula sebuah negara bangsa mengalami disintegrasi karena faktor-faktor ideologi, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh India awalnya adalah satu. Kemudian terpecah menjadi Pakistan, karena faktor ideologis. Pakistan pun kemudian terpecah pula menjadi Bangladesh. Demikian pula Negara Uni Sovyet yang terdiri dari berbagai kelompok ras, etnik, dan agama, yang awalnya disatukan oleh ideologi komunisme akhirnya juga harus berpecah menjadi negara-negara bangsa walau tetap disatukan oleh ikatan kebersamaan dalam satu persemakmuran yang disebut CIS (*Commonwealth Independence State*), yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan lain-lainnya. Indonesia pun pernah mengalami hal yang sama, waktu merdeka memiliki wilayah dari Sumatera sampai ke Sulawesi, kemudian dalam perjuangan trikorita kita membebaskan Irian Jaya, di dekade 1970-an kita “mengintegrasikan” Timor Timur yang saat itu sebagai wilayah jajahan Portugis. Akhirnya selepas Reformasi 1998 Timor Timur “memerdekakan diri” membentuk Timor Leste, melalui jajak pendapat.

Dalam konteks sejarah dunia, bangsa-bangsa ini ada yang timbul, kemudian membesar wilayah kekuasaannya, kemudian menyempit, dan bahkan ada yang hilang dari peta dunia, kemudian muncul lagi yang lainnya. Ada juga berbagai bangsa yang dilenyapkan oleh Tuhan karena pengingkarannya kepada ajaran-ajaran Tuhan. Tidak jarang pula beberapa kelompok manusia yang berbeda genealogis dan klennya membentuk negara bangsa secara bersama-sama. Kerberadaan, perkembangan, dan lenyapnya negara bangsa ini adalah sebagai kehendak Tuhan. Namun demikian, sebagai sebuah bangsa untuk memperkuat jati diri dan integrasi sosial di kalangan warganya, tentu harus terus-menerus menerapkan nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa tersebut. Dalam konteks Indonesia, misalnya kita memiliki ideologi Pancasila yang merupakan sumbangan utama para pendiri bangsa ini. Selain itu kita juga memiliki nilai-nilai kebangkitan bangsa, yang muncul embrionya di awal abad kedua puluh. Kebangkitan nasional ini perlu terus dihayati dan diamalkan semangatnya setiap saat, agar kita dapat merespons keadaan dunia yang serba galau, ragu, dan tergantung kepada hegemoni negara-negara adidaya atau *superpower*, dalam polarisasi yang benar.

Sebelum kita merdeka sebagai bangsa, para pemikir budaya kita telah memberikan sumbangan pemikiran ke arah polarisasi kebudayaan nasional. Mereka berdiskusi, bermusyawah, mewacanakan, dan berpolemik tentang apa itu kebudayaan nasional. Tulisan ini akan memerikan tentang gagasan kebudayaan nasional Indonesia dan aplikasinya dalam kehidupan kita, dalam konteks berbangsa dan bernegara.

## Gagasan Kebudayaan Nasional Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (*nation state*) yang sampai saat ini telah berumur hampir tujuh dekade. Dalam usianya yang demikian negara ini mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Indonesia pernah mengalami masa-masa revolusi fisik, ancaman disintegrasi, guncangan ekonomi, otoritarianisme dan sejenisnya—namun bangsa Indonesia juga telah menorehkan berbagai prestasi budaya di berbagai bidang yang diakui secara internasional. Bangsa Indonesia secara historis terbentuk dari eksistensi kebudayaan nenek moyangnya yang dimulai dari era animisme dan dinamisme sampai kurun pertama Masehi, dilanjutkan masa Hindu-Buddha abad pertama hingga tiga belas. Dilanjutkan masa Islam abad tiga belas hingga kini. Kemudian masa penjajahan kolonialisme bangsa-bangsa Barat abad ke-16, terutama oleh Belanda, selama tiga setengah abad. Di awal abad ke-20 muncul gagasan nasionalisme yang akhirnya menghantarkan bangsa Indonesia merdeka tahun 1945. Kemudian terjadi destabilisasi politik dari tahun 1945 hingga 1966. Namun saat ini telah tersamai dasar-dasar negara Indonesia, yaitu landasan ideologisnya Pancasila, dan landasan konstitusionalnya Undang-undang Dasar 1945 (UUD45).

Selama kurun waktu kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami tiga fase pemerintahan, yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Dalam mengisi periode-periode sejarah itu, berbagai aspek kebudayaan saling tumpang-tindih perkembangannya.

Sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia telah meletakkan dasar konstitusionalnya mengenai kebudayaan nasional, seperti yang termaktub dalam pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 (awal sebelum diamandemen). Bahkan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila merentangkan tulisan *Bhinneka Tunggal Ika* (yang artinya biar berbeda-beda tetapi tetap satu). Selengkapnya pasal 32 UUD 1945 (awal) berbunyi: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Ditambah dengan penjelasannya: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Sementara perubahan mengenai kebudayaan nasional ini telah diamandemen di dalam UUD 1945 versi terkini. Selengkapnya pasal 32 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. \*\*\*\*\*)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. \*\*\*\*\*)

Pasal 32 UUD 1945 yang diamandemen pada kali yang keempat tersebut di atas, pada pasal (1) memberikan arahan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Artinya bangsa Indonesia sadar bahwa budaya nasional mereka berada di dalam arus globalisasi, namun untuk mempertahankan jatidiri, masyarakat diberi kebebasan dan bahkan sangat perlu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya (tradisi atau etniknya). Pada pasal (2) pula, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa bahasa daerah (dan juga kesenian atau budaya daerah/etnik) sebagai bahagian penting dari kebudayaan nasional. Artinya kebudayaan nasional dibentuk oleh kebudayaan (bahasa) etnik atau daerah—*bukan kebudayaan asing*. Dengan demikian jelas bahwa Indonesia memiliki budaya nasional, yang berasal dari budaya etnik, dan bukan penjumlahan budaya etnik--sekali gus mengandung budaya asing yang dapat memperkaya budaya nasional.

Beberapa dekade menjelang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para intelektual dan aktivis budaya telah memiliki gagasan tentang kebudayaan nasional. Dalam konteks ini mereka mengajukan pemikirannya masing-masing sambil berpolemik apa itu kebudayaan nasional dan ke mana arah tujuannya. Pelbagai tulisan membahas gagasan itu dari berbagai sudut pandang, yang terbit dalam kurun masa dekade 1930-an.

Sebahagian tulisan ini merupakan hasil dari Permusyawaratan Perguruan Indonesia di Surakarta (Solo), pada tanggal 8 sampai 10 Juni 1935. Di antara intelektual budaya yang mengemukakan gagasannya adalah: Sutan Takdir Alisyahbana (STA) pengarang dan juga mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) Jakarta; Sanusi Pane, seorang pengarang; Soetomo, dokter dan pengarang; Tjindarbumi, wartawan; Poerbatjaraka, pakar filologi; Ki Hajar Dewantara, pendiri dan pemimpin perguruan nasional Taman Siswa (lihat Koentjaraningrat 1995).

Gagasan-gagasan mereka secara garis besar adalah sebagai berikut. Sutan Takdir Alisyahbana berpendirian bahwa gagasan kebudayaan nasional Indonesia, yang dalam artikelnya diistilahkan dengan *Kebudayaan Indonesia Raya*, sebenarnya baru mulai timbul dan disadari pada awal abad kedua puluh, oleh

generasi muda Indonesia yang berjiwa dan bersemangat keindonesiaan. Menurut beliau, sebelum gagasan Indonesia Raya disadari dan dikembangkan, yang ada hanyalah kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di daerah. Ia menganjurkan agar generasi muda Indonesia tidak terlalu tersangkut dalam kebudayaan pra-Indonesia itu, dan dapat membebaskan diri dari kebudayaan etniknya--agar tidak berjiwa provinsialis, tetapi dengan semangat Indonesia baru. Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang dikreasikan, yang baru sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan yang kini dianggap paling universal, yaitu budaya Barat. Unsur yang diambil terutama adalah pada empat unsur yaitu *teknologi*, *orientasi ekonomi*, *organisasi*, dan *sains*. Begitu juga orang Indonesia harus mempertajam rasio akalunya dan mengambil dinamika budaya Barat. Pandangan ini mendapat sanggahan sengit dari beberapa pemikir budaya lainnya.

Sanusi Pane menyatakan bahwa kebudayaan Nasional Indonesia sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan aspek kerohanian, perasaan dan gotong-royong, yang bertentangan dengan kebudayaan Barat yang terlalu berorientasi kepada materi, intelektualisme, dan individualisme. Sanusi Pane tidak begitu setuju dengan Sutan Takdir Alisyahbana yang dianggapnya terlalu berorientasi kepada kebudayaan Barat dan harus membebaskan diri dari kebudayaan pra-Indonesia, karena itu berarti pemutusan diri dari kesinambungan sejarah budayanya dalam rangka memasuki zaman Indonesia baru.

Pemikir lain, Poerbatjaraka menganjurkan agar orang Indonesia banyak mempelajari sejarah kebudayaannya, agar dapat membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan Indonesia baru itu harus berakar kepada kebudayaan Indonesia sendiri atau kebudayaan pra-Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Di sisi lain, Soetomo menganjurkan pula agar dasar-dasar sistem pendidikan pesantren (di Malaysia *pondok*, dan khusus di Aceh *dayah* atau *meunasah*) dipergunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional Indonesia, yang ditentang oleh Sutan Takdir Alisyahbana. Sementara itu, Adinegoro mengajukan sebuah gagasan yang lebih moderat, yaitu agar pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada kebudayaan nasional Indonesia, sedangkan kebudayaannya harus memiliki inti dan pokok yang bersifat kultur nasional Indonesia, tetapi dengan kulit (peradaban) yang bersifat kebudayaan Barat.

Sebuah gagasan akan dilanjutkan ke dalam praktik, agar ia fungsional dalam masyarakat pendukungnya. Fungsi sebuah gagasan bisa saja relatif sedikit, namun boleh pula menjadi banyak. Demikian pula gagasan kebudayaan nasional memiliki berbagai fungsi dalam negara Indonesia merdeka. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia memiliki dua fungsi: (i) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia dan (ii) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang *bhinneka* itu, untuk saling berkomunikasi, sehingga memperkuat solidaritas. Dalam fungsinya yang pertama,

kebudayaan nasional Indonesia memiliki tiga syarat: (1) harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia, atau hasil karya orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia; (2) unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikirannya atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia; dan (3) harus sebagai hasil karya warga negara Indonesia lainnya yang dapat menjadi kebanggaan mereka semua, sehingga mereka mau mengidentitaskan diri dengan kebudayaan itu.

Dalam fungsi kedua, harus ada tiga syarat yaitu dua di antaranya sama dengan syarat nomor satu dan dua fungsi pertama, syarat nomor tiga yaitu harus sebagai hasil karya dan tingkah laku warga negara Indonesia yang dapat difahami oleh sebahagian besar orang Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku-suku bangsa, umat agama, dan ciri keturunan ras yang aneka warna, sehingga menjadi gagasan kolektif dan unsur-unsurnya dapat berfungsi sebagai wahana komunikasi dan sarana untuk menumbuhkan saling pengertian di antara aneka warna orang Indonesia, dan mempertingi solidaritas bangsa.

Menurut penulis, dalam proses pembentukan budaya nasional Indonesia selain orientasi dan fungsinya, juga harus diperhatikan keseimbangan etnisitas, keadilan, dan kejujuran dalam mengangkatnya dari lokasi daerah (etnik) ke tingkat nasional. Sebaiknya proses ini terjadi secara wajar, alamiah dan natural--dan bukan bersifat pemaksaan pusat terhadap daerah atau sebaliknya. Di samping itu proses tersebut harus pula menyeimbangkan antara *bhineka* dan *ikanya* budaya Indonesia. Perlu disadari pula bahwa budaya nasional bukan penjumlahan kuantitatif budaya etnik Indonesia. Budaya nasional terjadi sebagai proses dialogis antara budaya etnik dan setiap etnik merasa memilikinya.

Dari uraian-uraian di atas jelas tergambar kepada kita adanya perbedaan pendapat di antara pemikir-pemikir budaya: (a) ada yang berorientasi kepada budaya Barat yang dinamis dan rasional, (b) adapula yang mengemukakan perlunya meneruskan budaya lama pra-Indonesia sambil menerima dan mengolah kebudayaan asing yang dapat memperkuat jatidiri nasional Indonesia. Dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945, tampaknya pendapat kedualah yang tercermin. Namun secara konseptual para pemikir budaya juga memiliki persamaan persepsi yaitu mereka setuju akan adanya dan terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia sejak lahirnya negara Republik Indonesia, yang berasal dari daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Selaras dengan era reformasi, maka berbagai tatanan negara dan masyarakat Indonesia akan berubah bentuk dan fungsinya, yang tentu saja akan berpengaruh kepada kebudayaan nasional. Saat ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan gabungan antara "unitarianisme dan federalisme" yang dikonsepsikan ke dalam otonomi daerah, begitu juga dengan kedudukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang ditata dan dikaji ulang agar terjalin keseimbangan kekuasaan. Demikian juga kebudayaan Nasional Indonesia seharusnya dapat mengekspresikan kepribadian bangsa Indonesia.

Dikotomi antara budaya Barat (Oksidental) dan Timur (Oriental) yang begitu dipertajam pada masa polemik kebudayaan, tampaknya tidak lagi begitu relevan dikembangkan pada masa kini. Permasalahan utama adalah bukan orang Indonesia mengambil budaya Barat atau secara kaku meneruskan budaya Timur dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang penting adalah bagaimana bangsa Indonesia mengolah dan mengelola budaya dunia dalam konteks memperkuat identitas budaya berdasarkan nilai-nilai universal. Bagaimana pun budaya Barat tidak anti budaya Timur atau sebaliknya. Bahkan Islam yang dianut sebahagian besar (87 % dari 240 juta) masyarakat Indonesia sendiri mengajarkan untuk menerima berbagai budaya dunia dalam konteks *tauhid* kepada Allah. Islam juga telah menyumbangkan berbagai peradaban modern ke seluruh dunia termasuk Barat. Termasuk Islam adalah sarana transmisi peradaban Barat yang menetapkan asasnya pada zaman Yunani-Romawi. Demikian juga agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik memiliki konsep *inkulturasi* yang sebenarnya juga menerima unsur-unsur kebudayaan etnik seluruh dunia dalam konteks ajaran Gereja.

Dalam kurun waktu hampir tujuh dekade Indonesia merdeka, penerapan kebudayaan nasional terus berkembang mencari bentuk, namun terbentuk melalui berbagai proses: (a) ada yang terjadi secara wajar menurut fungsi-fungsi sosial budaya pada masyarakat: (b) ada pula yang berkembang melalui saluran-saluran institusi tertentu dalam masyarakat: (c) ada yang muncul karena keinginan elit penguasa; dan (d) ada yang cenderung menafsirkan bahwa yang dimaksud budaya nasional itu adalah budaya yang dilakukan oleh kumpulan etnik mayoritas di Indonesia. Demikian sekilas gagasan kebudayaan nasional Indonesia, selanjutnya kita lihat bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam konteks berbangsa dan bernegara.

## Aplikasi

Suatu ide apapun bentuknya mestilah dipraktikkan untuk dapat berguna bagi yang memerlukannya. Adakalanya ide dan praktik sosial berbeda, namun tidak jarang pula yang sejalan dan selaras. Dengan melihat gambaran umum mengenai konsep kebudayaan nasional atau kebangsaan Indonesia, maka selanjutnya kita lihat bagaimana gagasan tersebut diaplikasikan.

Dalam konteks penerapan kebudayaan nasional, Koentjaraningrat dengan kapasitasnya sebagai ilmuwan sosial yang berwawasan luas, menunjuk beberapa unsur kebudayaan nasional Indonesia yang memenuhi dua fungsi utama yang dikemukakannya. Adapun unsur-unsur pemberi identitas nasional Indonesia, yaitu: untuk bahasa adalah bahasa Indonesia (berakar dari bahasa Melayu) dan daerah (etnik), untuk teknologi yaitu teknologi arkeologi dan prasejarah, untuk organisasi sosial adalah organisasi adat dalam mengelola irigasi di Bali, yang dikenal dengan sebutan *subak*, dan tatakrama adat; untuk pengetahuan yaitu ilmu obat-obatan tradisional *usada* di Bali dan Jawa; untuk kesenian adalah seni tekstil tradisional (batik, seni ikat, dan lain-lain), seni relief dan ukir, seni arsitektur candi, seni rias (pakaian daerah untuk wanita), seni lukis tradisional, seni suara tradisional (Bali,

Jawa), seni tari tradisional (Bali, Jawa), seni tari bela diri (pencak silat Minangkabau, Sunda, dan Jawa), dan seni drama tradisional (*wayang*), dan seni musik (Koentjaraningrat 1985).

Selanjutnya, unsur-unsur wahana komunikasi dan penguat solidaritas nasional, untuk bahasa adalah bahasa Indonesia; untuk ekonomi pengelolaan gaya Indonesia, untuk organisasi sosial adalah ideologi negara yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tatakrama nasional; untuk kesenian adalah seni lukis masa kini, sastra dalam bahasa nasional, seni drama (juga film) masa kini.

Menurut pendapat penulis, penentuan unsur-unsur kebudayaan nasional yang memberi identitas dan wahana komunikasi serta penguat solidaritas nasional, yang dikemukakan Koentjaraningrat di atas, adalah sangat *rigid*, tidak dinamik dan bersuasana "etnosentris." Bagaimanapun, kebudayaan nasional Indonesia masih akan terus berkembang secara dinamik dan mengikuti tuntutan zaman yang berproses secara alamiah, tidak mutlak ditentukan oleh para intelektual, tetapi menurut fungsi dan bentuk pada masyarakat Indonesia yang *bhinneka* tetapi *tunggal ika* itu.

Sampai sekarang budaya nasional Indonesia tercermin dalam berbagai ide, kegiatan, maupun artefak. Dalam bidang bahasa misalnya kita bersyukur kepada Tuhan dan pendiri negara ini bahwa bahasa Melayu dan disertai perkembangan bahasa kontemporer menjadi bahasa nasional Indonesia. Prosesnya pun terjadi secara wajar tanpa pemaksaan. Beberapa bangsa di dunia sampai sekarang masih mengalami gejolak dalam hal penentuan dan aplikasi bahasa nasionalnya. Pakaian nasional Indonesia kebaya untuk wanita dan peci, batik, atau jas juga mengalami berbagai proses kesejarahan yang unik dan menarik. Begitu juga dengan makanan khas dari daerah Minangkabau misalnya, telah menjadi makanan yang digemari oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Teknologi pembuatan kapal pinisi misalnya dapat menjadi model bagi pembuatan kapal tradisional Indonesia, atau teknologi kapal PAL di Surabaya.

Sementara di dunia internasional teknologi Indonesia juga diakui kecanggihannya. Bacharuddin Jusuf Habibie teknokrat dan mantan presiden Indonesia di awal Era Reformasi, dikenal secara internasional rumus aerodinamikanya untuk teknologi pesawat udara. Beberapa siswa Indonesia dapat meraih juara dalam Olimpiade Fisika dan Kimia tingkat dunia, serta berbagai prestasi gemilang lainnya. Hal ini menunjukkan kepada bangsa Indonesia dan dunia bahwa sains internasional juga dapat dikuasai dengan konsep kemitrasejajaran dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Begitu juga dengan ekonomi nasional kita yang digagas oleh Bung Hatta, yaitu ekonomi khas Indonesia sebagai hasil miksturisasi sistem ekonomi liberal dan sosialisme, kiranya tetap relevan diterapkan hingga pada masa kini.

Bukankah keterpurukan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sekarang ini, adalah bentuk "penyelewengan" dari kebijakan yang diambil oleh para pendiri bangsa ini. Demikian juga untuk unsur kebudayaan yang lainnya, bagaimanapun terus akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.



Dalam konteks kesenian misalnya seni pertunjukan Melayu yaitu *dangdut*, walau awalnya kurang mendapat perhatian publik, akhirnya meluas secara nasional bahkan transnasional. Begitu juga dengan *keroncong*. Bahkan, seorang etnomusikolog ternama Victor Ganap, dari Institut Seni Yogyakarta dalam suatu seminar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Padangpanjang mengemukakan bahwa selain bahasa, budaya Melayu juga menyumbangkan musik nasional Indonesia yang diistilahkannya dengan *musicafranca*. Namun kesenian dari etnik manapun di Indonesia tentunya akan dapat berkembang menjadi budaya nasional nantinya melalui proses yang alamiah dan dialogis. Perkembangan yang baru di bidang tari dan musik misalnya adalah tari *Poco-poco*, *Sajojo*, dan *Kulintang* (dari Indonesia Timur) yang begitu luas digunakan dan dikenal dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, yang bisa pula dikategorikan sebagai kesenian nasional. Demikian sekilas contoh-contoh penerapan kebudayaan nasional Indonesia yang dilakukan selama ini mengikuti proses perjalanan masa.

## Penutup

Indonesia sebagai negara bangsa memiliki konsep-konsep yang jelas tentang kebudayaan kebangsaannya. Gagasan kebudayaan nasional Indonesia telah diwacanakan beberapa dekade sebelum Indonesia merdeka. Konsep-konsep ini tentu saja harus relevan dengan dimensi terapan sosiobudaya, agar tidak terjadi benturan antara ide dan aktivitasnya. Kebudayaan nasional Indonesia memiliki identitas dan jatidiri yang berasal daripada nenek moyangnya, kemudian juga menerima unsur asing yang dapat memperkasakan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Menuju masa depan di era globalisasi yang tidak tentu arah ini, bangsa Indonesia harus berupaya membina kebudayaannya dengan memohon ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Insyah Allah Tuhan selalu bersama kita, amin. Selamat menyambut hari kebangkitan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Anderson, John. 1971. *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Singapura: Oxford University Press.
- Alfian (ed.), 1985. *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Bakar, Abdul Latiff Abu, 2005. "Menghayati Puisi Melayu sebagai Jati Diri Warga Malaysia." Kertas kerja pada Syarahan Perdana di Jabatan Pengajian Media, Universiti Malaya.
- Blagden, C.O., 1899. "The Name Melayu", *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*.
- Crawford, J. 1820. *History of the Indian Archipelago*. Edinburg: Archibald Constable and Co.
- Garraghan, Gilbert J., S.J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, East Fordham Road.
- Geldern, Robert Heine, 1972. *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gillin, G.L. dan J.P. Gillin. 1954. *For a Science of Social Man*. New York: McMillan.
- Goldsworthy, David J., 1979. *Melayu Music of North Sumatra: Continuities and Changes*. Sydney: Disertasi Doktorat Monash University.
- Gullick, J.M. 1972. *Sistem Politik Bumi Putera Tanah Melayu Barat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hall, D.G.E., 1968. *A History of South-East Asia*. St. Mertin Press, New York.

- Holt, Claire, 1967. *Art in Indonesia: Continuities and Changes*. New York: Cornell University Press.
- Harary, Frank; Robert Norman; dan Dorwin Cartwright, 1965. *Structural Models: An Introduction to the Theory of Directed Graphs*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Hill, A.H., 1968. "The Coming of Islam to North Sumatra," *Journal of Southeast Asian History*, 4(1).
- Koentjaraningrat, 1974. *Kebudayaan, Mentaliteit, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- , 1980a. *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cistra.
- , 1980b. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- , (ed.), 1980c. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- , (ed.), 1985. "Konsep Kebudayaan Nasional." dalam *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*, Alfian (ed.). Jakarta: Gramedia.
- Legge, J.D., 1964. *Indonesia*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Narrol, R., 1965. "Ethnic Unit Classification," *Current Anthropology*, volume 5, No. 4.
- Poerwadarminta, W.J.S. (ed.) 1965. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Radcliffe-Brown, A.R., 1952. *Structure and Function in Primitive Society*. Glencoe: Free Press.
- Raffles, Sir Thomas Stamford, 1830. *The History of Java*. Volume satu. London: Murray.
- Sinar, Tengku Luckman, 1994. *Jatidiri Melayu*. Medan: Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
- Takari, Muhammad. 1998. *Ronggeng Melayu Sumatera Utara: Sejarah, Fungsi dan Strukturnya*. tesis S-2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Veth, V.J., 1977. "Het Landschaap Deli op Sumatra." *Tijdschrift an het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, Del II.
- Whittington, W.A. 1963. "The Distribution of Population in Sumatra, Indonesia, 1961." *The Journal of Tropical Geography*, 17, 1963.
- Yoshiyuki, Tsurumi, 1981. *Malaka Monogatari: Sebuah Kisah di Melaka*. Tokyo: Jiji Tsushinsya.

## Tentang Penulis

**Muhammad Takari**, Dosen Fakultas Ilmu Budaya USU, lahir pada tanggal 21 Desember 1965 di Labuhanbatu. Menamatkan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Labuhanbatu. Tahun 1990 menamatkan studi sarjana seninya di Jurusan Etnomuskologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya tahun 1998 menamatkan studi magister humaniora pada Program Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menyelesaikan studi S-3 Pengajian Media Komunikasi di Universiti Malaya, Malaysia tahun 2010. Aktif sebagai dosen, peneliti, penulis di berbagai media dan jurnal dalam dan luar negeri. Juga sebagai seniman khususnya musik Sumatera Utara, dalam rangka kunjungan budaya dan seni ke luar negeri. Tahun 2009 sampai 2010 menjabat Ketua Program Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni FS USU. Kini sebagai Ketua Departemen Etnomuskologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara Medan. Kantor: Jalan Universitas No. 19 Medan, 20155, telepon/fax.: (061)8215956, e-mail: mtakari@yahoo.com; laman web: www.etnomuskologiusu.com; www.muhammadtakari.weebly.com.